

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dituliskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang tidak hanya berperan dalam mewujudkan demokrasi inklusif, tetapi juga turut serta membantu pemerintah setempat untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ataupun program kerja sesuai dengan bidang organisasinya. Ormas-ormas yang telah tercatat di Badan Kesbangpol Kota Semarang ini telah menjalankan kinerjanya dengan baik karena hasil nilai indeks kinerjanya melampaui nilai indeks kinerja ormas nasional. Namun, dalam pelaksanaan program kerja ormas-ormas di Kota Semarang masih ditemui ketidaksesuaian antara rencana program dengan pelaksanaannya. Ormas-ormas di Kota Semarang juga masih mengalami kendala terkait keuangan organisasi karena sumber pendapatannya yang tidak tetap dan sistem pelaporannya belum berjalan dengan baik.
2. Pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkup pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang bertujuan untuk menjaga kondusifitas wilayah Kota Semarang dengan mencegah berbagai permasalahan yang dapat timbul karena keberadaan ormas. Tujuan pengawasan ini sudah tercapai apabila

melihat minimnya tingkat konflik yang terjadi antar ormas maupun konflik ormas dengan masyarakat umum di Kota Semarang. Selain itu, pengawasan ormas di Kota Semarang juga bermanfaat sebagai deteksi dini agar konflik yang terjadi bisa segera diketahui dan diselesaikan sehingga dampaknya tidak meluas dan merugikan banyak pihak.

3. Pelaksanaan pengawasan ormas yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Mulai dari tujuan pengawasan, pembentukan tim terpadu pengawasan ormas, pemfasilitasian aduan masyarakat, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan seluruhnya dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan pengawasan ormas, Badan Kesbangpol Kota Semarang menggunakan lima metode pengawasan yaitu, pengawasan langsung, tidak langsung, formal, informal, dan administratif. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan ini adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sub timdu pengawasan ormas yang bertugas terjun ke lapangan, sehingga terkadang tidak semua kegiatan ormas dapat dipantau secara langsung pada hari yang sama. Selain jumlah anggota sub timdu yang terbatas, tidak ditemui kendala lain dalam pelaksanaan pengawasan ormas di Kota Semarang. Pengawasan ormas yang dilakukan Badan Kesbangpol Kota Semarang

telah berjalan dengan cukup baik dan tidak membatasi kebebasan ormas selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Kondisi ini membuat Badan Kesbangpol Kota Semarang mulai menggeser paradigma pengawasan menjadi pemberdayaan dalam pengawasan dengan menjadikan ormas-ormas di Kota Semarang sebagai mitra pemerintah. Namun, hingga akhir tahun 2022 pelaksanaan pemberdayaan dalam pengawasan ormas di Kota Semarang masih belum merata.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Kesbangpol Kota Semarang beserta tim terpadu pengawasan ormas perlu meningkatkan jumlah tenaga kerja operasional yang bertugas untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir beban kerja setiap anggota sehingga lebih banyak kegiatan ormas yang dapat diawasi secara langsung atau *real time* pada saat kegiatan tersebut diadakan. Dengan demikian, maka pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang dapat menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Badan Kesbangpol Kota Semarang perlu meningkatkan upaya pemberdayaan dalam pengawasan agar dapat dirasakan oleh seluruh ormas di Kota Semarang, termasuk dalam pengadaan kegiatan pendidikan maupun keterbukaan informasi mengenai hubungan kerja

sama antara ormas dengan OPD lain. Semakin banyak ormas yang diberdayakan dalam pengawasan, maka semakin banyak pula ormas yang memiliki kesadaran diri dan rasa tanggung jawab untuk bersama-sama menjaga kondusifitas wilayah Kota Semarang.

3. Badan Kesbangpol Kota Semarang diharapkan dapat mempublikasikan hasil pengawasan ormas dalam bentuk kajian ataupun laporan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dan juga ormas-ormas di Kota Semarang. Hal ini diperlukan karena Badan Kesbangpol adalah lembaga publik, sehingga transparansi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih